

ABSTRAK

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan negara karena untuk menciptakan pemerintahan yang optimal, dalam hal pelaksanaan tugasnya, pemerintah perlu didukung dengan pengadaan barang maupun jasa melalui belanja. Pelaksanaan PBJP yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dapat menunjang terlaksananya pembangunan nasional dengan meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional. Untuk itu, seiring dengan perkembangan dalam hal pengadaan barang dan jasa, pemerintah menetapkan peraturan terbaru mengenai regulasi PBJP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi acuan pengadaan Traktor Besar yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2021 dengan menggunakan metode Tender Cepat. Melihat pentingnya pelaksanaan PBJP yang sesuai dengan aturan yang berlaku, pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian menjadi penting untuk ditinjau kesesuaiannya sebagai sarana evaluasi dan kajian.

Kata kunci: Pajak Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tender Cepat, Traktor Besar

Abstract

Government procurement of goods/services is an important activity in the administration of the state because to create an optimal government, in terms of carrying out its duties, the government needs to be supported by the procurement of goods and services through spending. Implementing PBJP following applicable laws can support the implementation of national development by improving public services and the national economy. For this reason, along with results in terms of procurement of goods and services, the government has established the latest regulations regarding PBJP regulations, namely Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. This regulation is a reference for the procurement of Large Tractors carried out by the North Tapanuli Regency Agriculture Office in the 2021 fiscal year using the Quick Tender method. Seeing the importance of implementing PBJP by applicable regulations, the procurement of large tractors by the Department of Agriculture is essential to review its suitability as a means of evaluation and study.

Keywords: Procurement Tax, Government Procurement of Goods/Services, Fast Tender, Big Tractor